PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disebut KPPT, adalah kantor yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi, simplikasi dan keamanan.

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan pelayanan pemberian IMB dilaksanakan oleh :

a. KPPT ; dan

b. Camat se Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

(2) Kewenangan pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. KPPT dapat memberikan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. Camat hanya memberikan pelayanan di wilayah yang dimilikinya.

(3) Dalam penyelenggaraan pemberian IMB, KPPT dan Camat dibantu Tim Teknis yang memahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan IMB seperti Rencana Tata Ruang Wilayah dan dokumen tata ruang lainnya serta dokumen yang berkaitan dengan izin lingkungan.

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Jenis pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemberian IMB meliputi :

a. Izin mendirikan bangunan baru;

b. Izin perbaikan, penggantian, renovasi dan rehabilitasi bangunan lama;

c. Perubahan fungsi bangunan;

d. Pemutihan Izin mendirikan bangunan; dan

e. Balik nama Izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

(1) KPPT berwenang memberikan pelayanan apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

a. Bangunan dengan luas 200 m2 atau lebih;

b. Bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih;

c. Memiliki basemen (bangunan di bawah tanah);

d. Mensyaratkan izin lingkungan;

e. Mensyaratkan utilitas keamanan dan/atau kesehatan;

f. Semua bangunan Pemerintah yang dibiayai oleh APBD, APBN secara keseluruhan atau sebagian ;

g. Bangunan komplek perumahan, komplek perkantoran, komplek pertokoan, komplek pergudangan atau komplek perusahaan dan sejenisnya.

(2) Camat berwenang memberikan pelayanan apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

a. Bangunan dengan luas kurang 200 m2;

b. Bangunan tidak berlantai 2 (dua) atau lebih;

c. Tidak memiliki basement (bangunan di bawah tanah);

d. Tidak mensyaratkan izin lingkungan;

e. Tidak mensyaratkan utilitas keamanan dan/atau kesehatan;

f. Bukan bangunan Pemerintah yang dibiayai oleh APBD, APBN secara keseluruhan atau sebagian ;

g. Bukan Bangunan komplek perumahan, komplek perkantoran, komplek pertokoan, komplek pergudangan atau komplek perusahaan dan sejenisnya.

(3) Jika sebuah bangunan luasnya kurang dari 200 m2 tetapi memiliki 2 (dua) lantai atau lebih, kewenangan memberikan pelayanan adalah KPPT.

(4) Jika sebuah bangunan luasnya kurang dari 200 m2 tetapi mensyaratkan izin lingkungan, kewenangan memberikan pelayanan adalah KPPT.

Pasal 4

(1) Bangunan berupa komplek atau bangunan lainnya yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan harus mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang membidangi tata ruang atau badan/tim koordinasi yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati.

(2) Bangunan atau tempat usaha yang dapat mengakibatkan terganggunya fasilitas lain harus mengantisipasinya dan mencegahnya agar tidak menggangu fungsi bangunan lainnya.

(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka (2) seperti bangunan tempat cuci mobil dan/atau motor yang air kotor bekas cuciannya langsung dibuang kesaluran drainase, padahal air kotor tersebut mengandung sedimen partikel padat yang dapat mengganggu fungsi drainase, maka pemilik bangunan tersebut wajib membuat bangunan penyaring atau peredam agar hanya air yang masuk ke saluran drainase serta wajib membersihkan bangunan penyaring atau peredam secara rutin.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 5

(1) Pemohon mendatangi KPPT atau Camat sesuai sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 untuk mendapatkan/mengambil formulir permohonan IMB.

(2) Pengambilan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

(3) Pemohon mengisi formulir secara benar sesuai ketentuan yang berlaku dan melampirkan semua dokumen persyaratan yang ditentukan.

(4) Pemohon menyampaikan formulir permohonan dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Bupati melalui KPPT atau Camat.

(5) KPPT atau Camat memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(6) Bupati melalui KPPT atau Camat paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.

(7) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat berupa menerima atau menolak permohonan IMB.

(8) Apabila permohonan IMB diterima, Pemohon membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku ke kas daerah melalui bendaharawan penerima yang ditunjuk pada kantor pemberi pelayanan.

(9) Apabila permohonan IMB ditolak, Pemohon dapat merubah dan/atau memperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat mengajukan permohonan kembali.

(10) Pemohon menerima Keputusan IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima petugas pelayanan.

(11) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ditambah ayat (10) ini telah lewat dan KPPT atau Camat tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

(12) Jangka waktu proses pelayanan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku dengan ketentuan permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis.

Pasal 6

(1) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) yang disampaikan kepada KPPT wajib melampirkan surat rekomendasi Camat sesuai lokasi bangunan.

(2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) yang disampaikan kepada Kantor camat tidak memerlukan surat rekomendasi.

(3) Dalam hal KPPT atau Camat sudah memiliki Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memerlukan rekomendasi dari Dinas teknis terkait khususnya yang membidangi tata ruang.

(4) Dalam hal Permohonan IMB mensyaratkan izin lingkungan atau izin lokasi dan rekomendasi dari dinas/instansi teknis bidang tata ruang, dan/atau kehutanan, pertanian, perkebunan, badan pertanahan serta badan/tim yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati, Pemohon wajib mengurus izin atau rekomendasi tersebut sebelum mengajukan permohonan IMB.

(5) Khusus untuk bangunan usaha yang memiliki waktu operasional selama 24 jam harus melampirkan rekomendasi dari pihak Kepolisian.

(6) Surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui KPPT.

Pasal 7

Bentuk Formulir dan Dokumen/data dukung permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 8

(1) Dalam menerbitkan Surat Keputusan IMB, Camat wajib melaporkannya kepada Bupati melalui KPPT setiap bulan.

(2) Surat Keputusan IMB yang diterbitkan oleh KPPT dan Camat wajib ditembuskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas/Badan yang membidangi tata ruang.

Pasal 9

(1) Pengawasan terhadap semua bangunan dan perkembangannya menjadi tanggungjawab Camat sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

(2) Camat dalam pengawasannya dibantu Lurah/Kepala Desa serta didukung oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

(3) Camat dalam menangani semua permasalahan yang berkaitan dengan IMB dan pengawasan serta perkembangannya wajib mengutamakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan.

(4) Penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat dapat dibantu petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Teknis terkait lainnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 22 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. YUSUF EFFENDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

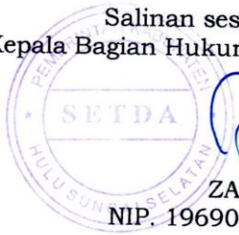

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 179

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BENTUK FORMULIR DAN DOKUMEN/DATA DUKUNG PERMOHONAN IMB

No Pendaftaran : .....

Tanggal Pendaftaran : .....

Lampiran K1a

FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

..... 20....

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Mendirikan Bangunan
.....*)

Kepada
Yth. Camat .....
di-
.....

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT. ..... RK. .....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS
Pekerjaan : .....
No. Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk izin mendirikan bangunan ..... dengan ukuran panjang : ..... M', lebar : ..... M' (Luas ..... M2) di atas tanah HM/ HGB/ HP ***) No ..... yang bersifat : permanen/ semi permanen ***) yang terletak di Jl.....RT.....RK..... Kelurahan/Desa. .....Kec. .....Kab. HSS.

IMB tersebut agar dapat dibuatkan atas nama :

Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT.....RK.....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS.
Pekerjaan : .....

Rencana bangunan tersebut di atas berbatasan di :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Mengetahui : Pemohon,

Lurah/Kades Ketua RT

....

Keterangan :

*) diisi oleh petugas
**) diisi nama pemohon atau nama badan hokum
***) coret yang tidak perlu

HM : Hak Milik
HGB : Hak Guna Bangunan
HP : Hak Pakai

Lampiran K1b

DAFTAR PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

No.	Jenis Lampiran	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan/Formulir.			
2.	Fotokopi Surat Bukti Hak Atas Tanah, dimana bangunan tersebut direncanakan dibangun.			
3.	Fotokopi PBB tahun terakhir.			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).			
5.	Rekomendasi Camat lokasi yang akan dibangun.			
6.	Foto copy dokumen AMDAL atau UKL / UPL atau SPPL bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan/ memiliki dampak penting terhadap lingkungan.			
7.	Rekomendasi dokumen Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN) bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak wajib AMDAL.			
8.	Surat izin lokasi/perizinan dan rekomendasi teknis : a. ..... b.			
9.	Fotocopy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan.			
10.	Foto copy rekomendasi dari Departemen Agama dan Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi bangunan tempat ibadah.			
11.	Untuk Bangunan Menara Telekomunikasi ditambah : a. asuransi kecelakaan dari segala resiko yang ditimbulkan dengan keberadaan menara. b. kajian dari dampak radiasi.			
12.	Surat pernyataan persetujuan jiran.			
13.	Peta situasi rencana pembangunan.			
14.	Surat pernyataan menanam pohon.			
15.	Persyaratan lainnya : a. ..... b. ..... c.			
16.	Surat perjanjian pemanfaatan tanah.			

No Pendaftaran : .....

Tanggal Pendaftaran : .....

Lampiran K2a

FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN FUNGSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

..... 20....

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Perubahan Fungsi IMB
.....*)

Kepada
Yth. Camat .....
di-
.....

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT. ..... RK. .....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS
Pekerjaan : .....
No. Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan fungsi izin mendirikan bangunan dari peruntukan..... menjadi ..... dengan ukuran panjang : ..... M', lebar : ..... M' (Luas ..... M2) di atas tanah HM/ HGB/ HP ***) No.....yang bersifat : permanen/ semi permanen ***) yang terletak di Jl.....RT.....RK.....
Kelurahan/Desa.....
Kec.....Kab. HSS.

Rencana bangunan tersebut di atas berbatasan di :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Mengetahui : Pemohon,

Lurah/Kades Ketua RT

....

Keterangan :

*) diisi oleh petugas
**) diisi nama pemohon atau nama badan hukum
***) coret yang tidak perlu

HM : Hak Milik
HGB : Hak Guna Bangunan
HP : Hak Pakai

Lampiran K2b

DAFTAR PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

No.	Jenis Lampiran	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan/Formulir.			
2.	Fotokopi Surat Bukti Hak Atas Tanah, dimana bangunan tersebut direncanakan dibangun.			
3.	Fotokopi PBB tahun terakhir.			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).			
5.	Rekomendasi Camat lokasi yang akan dibangun.			
6.	Foto copy dokumen AMDAL atau UKL / UPL atau SPPL bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan/ memiliki dampak penting terhadap lingkungan.			
7.	Rekomendasi dokumen Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN) bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak wajib AMDAL.			
8.	Surat izin lokasi/perizinan dan rekomendasi teknis : a. ..... b.			
9.	Fotocopy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan.			
10.	Foto copy rekomendasi dari Departemen Agama dan Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi bangunan tempat ibadah.			
11.	Untuk Bangunan Menara Telekomunikasi ditambah : a. asuransi kecelakaan dari segala resiko yang ditimbulkan dengan keberadaan menara. b. kajian dari dampak radiasi.			
12.	Surat pernyataan persetujuan jiran.			
13.	Peta situasi rencana pembangunan.			
14.	Surat pernyataan menanam pohon.			
15.	Persyaratan lainnya : a. ..... b. ..... c.			
16.	Surat perjanjian pemanfaatan tanah.			

No Pendaftaran : .....
Tanggal Pendaftaran : .....

Lampiran K3a

FORMULIR PERMOHONAN BALIK NAMA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

..... 20.....

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Balik Nama IMB
.....*)

Kepada
Yth. Camat .....
di-
.....

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT. ..... RK. .....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS
Pekerjaan : .....
No. Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan balik nama izin mendirikan bangunan untuk .....dengan ukuran panjang : ..... M', lebar : ..... M' (Luas ..... M2) di atas tanah HM/ HGB/ HP ***)
No ....., atas nama :

Nama Pemegang IMB Lama : ..... **)
Nomor dan Tanggal IMB Lama : .....
Sifat Bangunan : permanen/semi permanen ***)
Lokasi bangunan yang dimohonkan balik nama terletak di :
Alamat : Jl. .....RT.....RK.....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS.

Rencana bangunan tersebut di atas berbatasan di :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Pemohon,

Lurah/Kades

Ketua RT

....

Keterangan :

*) diisi oleh petugas
**) diisi nama pemohon atau nama badan hokum
***) coret yang tidak perlu

HM : Hak Milik
HGB : Hak Guna Bangunan
HP : Hak Pakai

Lampiran K3b

DAFTAR PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

No.	Jenis Lampiran	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan/Formulir dari KPPT.			
2.	Surat Bukti Hak Atas Tanah, dimana bangunan tersebut berada.			
3.	Fotocopy PBB tahun terakhir.			
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Lama dan Pemohon.			
5.	Foto copy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan.			
6.	Foto copy IMB lama.			
7.	Surat pernyataan tidak ada perubahan bangunan.			
8.	Surat pernyataan persetujuan jiran.			
9.	Surat pernyataan menanam pohon.			
10.	Persyaratan lainnya : a. ..... b. ..... c.			
11.	Surat perjanjian pemanfaatan tanah.			

No Pendaftaran : .....
Tanggal Pendaftaran : .....

Lampiran K4a

FORMULIR PERMOHONAN RENOVASI DAN REHABILITASI BANGUNAN

..... 20.....

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan .....*)

Kepada
Yth. Camat .....
di-
.....

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT. ..... RK. .....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS
Pekerjaan : .....
No. Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan renovasi dan rehabilitasi bangunan ..... dengan ukuran panjang : ..... M', lebar : ..... M' (Luas ..... M2) di atas tanah HM/ HGB/ HP ***) No ....., atas nama :

Nama Pemegang IMB Lama : ..... **)
Nomor dan Tanggal IMB Lama : .....
Sifat Bangunan : permanen/semi permanen ***)
Lokasi bangunan yang dimohonkan untuk renovasi dan rehabilitasi terletak di :
Alamat : Jl. .....RT.....RK.....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS.

Rencana bangunan tersebut di atas berbatasan di :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Lurah/Kades

Ketua RT

Pemohon,

....

Keterangan :

*) diisi oleh petugas
**) diisi nama pemohon atau nama badan hokum
***) coret yang tidak perlu

HM : Hak Milik
HGB : Hak Guna Bangunan
HP : Hak Pakai

Lampiran K4b

DAFTAR PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

No.	Jenis Lampiran	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan/Formulir dari KPPT.			
2.	Surat Bukti Hak Atas Tanah, dimana bangunan tersebut direncanakan dibangun.			
3.	Fotocopy PBB tahun terakhir.			
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
5.	Foto copy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan.			
6.	Foto copy IMB lama.			
7.	Surat pernyataan tidak ada perubahan bangunan.			
8.	Surat pernyataan persetujuan jiran.			
9.	Peta situasi rencana pembangunan.			
10.	Surat pernyataan menanam pohon.			
11.	Persyaratan lainnya : a. ..... b. ..... c.			
12.	Surat perjanjian pemanfaatan tanah			

No Pendaftaran : .....
Tanggal Pendaftaran : .....

Lampiran K5a

FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

..... 20....

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Mendirikan Bangunan
Bangunan Milik Pemerintah
.....*)

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Kandangan

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT. ..... RK. .....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS
Pekerjaan : .....
No. Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendirikan bangunan ..... dengan ukuran panjang : ..... M', lebar : ..... M' (Luas ..... M2) di atas tanah HM/ HGB/ HP ***) No .....yang bersifat : permanen/ semi permanen ***) yang terletak di Jl.....RT ..... RK. ..... Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS.

IMB tersebut agar dapat dibuatkan atas nama :

Nama : ..... **)
Alamat : Jl. ..... RT. ..... RK. .....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS.
Pekerjaan : .....

Rencana bangunan tersebut di atas berbatasan di :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Mengetahui : Pemohon,

Lurah/Kades Ketua RT

....

Keterangan :
*) diisi oleh petugas
**) diisi nama pemohon atau nama badan hukum
***) coret yang tidak perlu

HM : Hak Milik
HGB : Hak Guna Bangunan
HP : Hak Pakai

Lampiran K5b

DAFTAR PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

No.	Jenis Lampiran	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan/Formulir.			
2.	Fotokopi Surat Bukti Hak Atas Tanah, dimana bangunan tersebut direncanakan dibangun.			
3.	Rekomendasi Camat lokasi yang akan dibangun.			
4.	Foto copy dokumen AMDAL atau UKL / UPL atau SPPL bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan/ memiliki dampak penting terhadap lingkungan.			
5.	Surat izin lokasi/perizinan dan rekomendasi teknis : a. ..... b.			
6.	Fotocopy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan.			
7.	Peta situasi rencana pembangunan.			
8.	Surat pernyataan menanam pohon.			
9.	Persyaratan lainnya : a. Dokumen Kontrak b. Gambar Rencana Desain dan Volume c.			

Lampiran K6a

PERHITUNGAN LUAS BANGUNAN BERTINGKAT DAN BASEMENT

KOEFISIEN LUAS BANGUNAN

NO	URAIAN	KOEFISIEN (K)	RUMUS	KETERANGAN
A.	LANTAI			
	1. Lantai 1 s.d 2 2. Lantai 3 s.d 6 3. Lantai 7 s.d 10 4. Lantai > 10	1 2 3 4	A = (p x l) K	A = Luas (m2) p = panjang (m) l = lebar (m) K = koefisien
B.	BASEMENT			
	1. Basement 1 s.d 2 2. Basement 3 s.d 4 3. Basement > 4	4 5 6	A = (p x l) K	

Contoh :

Sebuah bangunan mempunyai 1 basement dan 3 lantai dengan ukuran semua lantai sama,

yaitu panjang = 10 m dan lebar = 8 m.

Maka A = A basement + A Lantai 1 + A Lantai 2 + A Lantai 3

$= (p_1 x l_1)K + (p_2 x l_2)K + (p_3 x l_3)K + (p_4 x l_4)K$

= (10x8)4 + (10x8)1 + (10x8)1 + (10x8)2

= 320 + 80 + 80 + 160

= 640 m2

Jadi, luas bangunan tersebut adalah 640 m2.

PERHITUNGAN VOLUME TOWER/MENARA TELEKOMUNIKASI

KOEFISIEN VOLUME TOWER/MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	URAIAN	KOEFISIEN (K)	RUMUS	KETERANGAN
1. 2. 3. 4.	Tinggi s.d 20 m Tinggi 20 s.d 40 m Tinggi 40 s.d 100 m Tinggi > 100 m	0,2 0,15 0,125 0,1	$V = \left(\frac{A_1 + A_2}{2} \right) K \times t$	V = Volume (m3) A_1 = Luas Bangunan$_1$ (m2) A_2 = Luas Bangunan$_2$ (m2) K = koefisien T = tinggi

Contoh :

Sebuah bangunan menara telekomunikasi/tower, bangunan bagian bawah berbentuk segi empat dengan ukuran panjang = 2 m dan lebar = 2 m dan bangunan bagian atas berbentuk segi empat dengan ukuran panjang = 0,5 m dan lebar = 0,5 m dengan tinggi = 80 m.

$A_1 = p_1 \times l_1$
$= 2 \times 2 = 4$ m2

$A_2 = p_2 \times l_2$
$= 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25$ m2

Maka $V = \frac{(A_1 + A_2)}{2} K \times t$

$= \frac{(4 + 0{,}25)}{2} 0{,}125 \times 80$

$= 2{,}125 \times 0{,}125 \times 80$

$= 21{,}25$ m3

Jadi, volume bangunan menara telekomunikasi/tower tersebut adalah 21,25 m3.

Catatan :
Jika terdapat perbedaan tinggi dengan jumlah luasan yang berbeda maka dihitung per bagian kemudian dijumlahkan.

Lampiran K7

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KANTOR PELAYAN PERIZINAN TERPADU

Jalan .....

KANTOR PELAYAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR .....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA KANTOR PELAYAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

a. ...

b. ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ..... tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ..... Nomor.....);

Memperhatikan:

1. Surat Permohonan An. ..... tanggal..... Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Rekomendasi Camat .....Nomor :.....Tanggal.....;
3. Rekomendasi Laporan Hasil Pengukuran Tim Teknis, tanggal.....;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :

Nama :
Alamat :
Untuk Mendirikan Bangunan :
Yang Terletak di :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Bangunan yang diberikan IMB sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berukuran :

Volume Bangunan : 1.
2.
3.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktu KESATU deberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Letak Bangunan maupun batas-batasnya harus sesuai Desain/Gambar situasi sebagaimana terlampir, dengan Garis Sempadan Bangunan ..... M dan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku :

   a. ...
   b. ...
   c. ...

2. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
3. Telah membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar : Rp. ..... (dengan angka).
4. Pelaksanaan pembangunan hanya dilakukan setelah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
5. Mendirikan Bangunan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Tata Ruang Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berlaku.
6. Apabila Pemerintah mengadakan pelebaran jalan atau ada keperluan lainnya yang menyangkut Kepentingan Umum maka bangunan tersebut dibongkar dengan perongkosan / biaya sendiri oleh yang bersangkutan.
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini dapat ditinjau / ditarik, apabila diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan demi kepentingan umum dan pembangunan.

KEEMPAT : Apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, maka pemberian izin akan dicabut kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KANTOR PELAYAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

.....
NIP. .....

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.HSS
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab.HSS
4. Inspektur Kab.HSS
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.HSS
6. Arsip

No Pendaftaran : .....
Tanggal Pendaftaran : .....

Lampiran C1a

FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

..... 20....

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Mendirikan Bangunan
.....*)

Kepada
Yth. Camat .....
di-
.....

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT. ..... RK. .....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS
Pekerjaan : .....
No. Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendirikan bangunan ..... dengan ukuran panjang : ..... M', lebar : ..... M' (Luas ..... M2) di atas tanah HM/ HGB/ HP ***) No ..... yang bersifat : permanen/ semi permanen ***) yang terletak di Jl.....RT.....RK.....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS.

IMB tersebut agar dapat dibuatkan atas nama :

Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT.....RK.....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS.
Pekerjaan : .....

Rencana bangunan tersebut di atas berbatasan di :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Lurah/Kades | Ketua RT | Pemohon,

....

Keterangan :

*) diisi oleh petugas
**) diisi nama pemohon atau nama badan hukum
***) coret yang tidak perlu

HM : Hak Milik
HGB : Hak Guna Bangunan
HP : Hak Pakai

Lampiran C1b

DAFTAR PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

No.	Jenis Lampiran	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan/Formulir dari KPPT.			
2.	Fotokopi Surat Bukti Hak Atas Tanah, dimana bangunan tersebut direncanakan dibangun.			
3.	Fotokopi PBB tahun terakhir.			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).			
5.	Surat izin lokasi/perizinan dan rekomendasi teknis : a. ..... b.			
6.	Fotocopy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan.			
7.	Foto copy rekomendasi dari Departemen Agama dan Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi bangunan tempat ibadah.			
8.	Permohonan IMB untuk Bangunan Menara Telekomunikasi ditambah : a. asuransi kecelakaan dari segala resiko yang ditimbulkan dengan keberadaan menara. b. kajian dari dampak radiasi.			
9.	Surat pernyataan persetujuan jiran.			
10.	Peta situasi rencana pembangunan.			
11.	Surat pernyataan menanam pohon.			
12.	Persyaratan lainnya : a. ..... b. ..... c.			
13.	Surat perjanjian pemanfaatan tanah.			

No Pendaftaran : .....
Tanggal Pendaftaran : .....

Lampiran C2a

FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN FUNGSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

..... 20.....

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Perubahan Fungsi IMB

Yth. Kepada
Camat .....
di-
.....

.....*)

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT. ..... RK. .....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS
Pekerjaan : .....
No. Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan fungsi izin mendirikan bangunan dari peruntukan..... menjadi ..... dengan ukuran panjang : ..... M', lebar : ..... M' (Luas ..... M2) di atas tanah HM/ HGB/ HP ***) No.....yang bersifat : permanen/ semi permanen ***) yang terletak di Jl.....RT.....RK..... ..Kelurahan/Desa..... Kec.....Kab. HSS.

Rencana bangunan tersebut di atas berbatasan di :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Lurah/Kades | Ketua RT | Pemohon,

....

Keterangan :

*) diisi oleh petugas
**) diisi nama pemohon atau nama badan hukum
***) coret yang tidak perlu

HM : Hak Milik
HGB : Hak Guna Bangunan
HP : Hak Pakai

Lampiran C2b

DAFTAR PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

No.	Jenis Lampiran	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan/Formulir dari KPPT.			
2.	Fotokopi Surat Bukti Hak Atas Tanah, dimana bangunan tersebut direncanakan dibangun.			
3.	Fotokopi PBB tahun terakhir.			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).			
5.	Surat izin lokasi/perizinan dan rekomendasi teknis : a. ..... b.			
6.	Fotocopy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan.			
7.	Foto copy rekomendasi dari Departemen Agama dan Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi bangunan tempat ibadah.			
8.	Permohonan IMB untuk Bangunan Menara Telekomunikasi ditambah : a. asuransi kecelakaan dari segala resiko yang ditimbulkan dengan keberadaan menara. b. kajian dari dampak radiasi.			
9.	Surat pernyataan persetujuan jiran.			
10.	Peta situasi rencana pembangunan.			
11.	Surat pernyataan menanam pohon.			
12.	Persyaratan lainnya : a. ..... b. ..... c.			
13.	Surat perjanjian pemanfaatan tanah.			

No Pendaftaran : .....
Tanggal Pendaftaran : .....

Lampiran C3a

FORMULIR PERMOHONAN BALIK NAMA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

..... 20.....

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Balik Nama IMB
.....*)

Kepada
Yth. Camat .....
di-
.....

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT. ..... RK. .....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS
Pekerjaan : .....
No. Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan balik nama izin mendirikan bangunan untuk .....dengan ukuran panjang : ..... M', lebar : ..... M' (Luas ..... M2) di atas tanah HM/ HGB/ HP ***)
No ....., atas nama :

Nama Pemegang IMB Lama : ..... **)
Nomor dan Tanggal IMB Lama : .....
Sifat Bangunan : permanen/semi permanen ***)
Lokasi bangunan yang dimohonkan balik nama terletak di :
Alamat : Jl. .....RT.....RK.....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS.

Rencana bangunan tersebut di atas berbatasan di :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Bersama ini Kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Mengetahui : Pemohon,

Lurah/Kades Ketua RT

....

Keterangan :
*) diisi oleh petugas
**) diisi nama pemohon atau nama badan hukum
***) coret yang tidak perlu

HM : Hak Milik
HGB : Hak Guna Bangunan
HP : Hak Pakai

Lampiran C3b

DAFTAR PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

No.	Jenis Lampiran	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan/Formulir dari KPPT.			
2.	Surat Bukti Hak Atas Tanah, dimana bangunan tersebut berada.			
3.	Fotocopy PBB tahun terakhir.			
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Lama dan Pemohon.			
5.	Foto copy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan.			
6.	Foto copy IMB lama.			
7.	Surat pernyataan tidak ada perubahan bangunan.			
8.	Surat pernyataan persetujuan jiran.			
9.	Surat pernyataan menanam pohon.			
10.	Persyaratan lainnya : a. ..... b. ..... c.			
11.	Surat perjanjian pemanfaatan tanah.			

No Pendaftaran : .....
Tanggal Pendaftaran : .....

Lampiran C4a

FORMULIR PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

..... 20.....

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Pemutihan IMB
.....*)

Kepada
Yth. Camat .....
di-
.....

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT. ..... RK. .....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS
Pekerjaan : .....
No. Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pemutihan izin mendirikan bangunan untuk ..... yang didirikan tahun ..... dengan ukuran panjang : ..... M', lebar : ..... M' (Luas ..... M2) di atas tanah HM/ HGB/ HP ***) No ..... yang bersifat : permanen/ semi permanen ***) yang terletak di .....RT.....RK.....Kelurahan/ Desa.....Kec..... .....Kab. HSS.

Rencana bangunan tersebut di atas berbatasan di :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Lurah/Kades | Ketua RT | Pemohon,

..... | ..... | .....

Keterangan :
*) diisi oleh petugas
**) diisi nama pemohon atau nama badan hukum
***) coret yang tidak perlu

HM : Hak Milik
HGB : Hak Guna Bangunan
HP : Hak Pakai

Lampiran C4b

DAFTAR PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

No.	Jenis Lampiran	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan/Formulir dari KPPT.			
2.	Fotokopi Surat Bukti Hak Atas Tanah, dimana bangunan tersebut direncanakan dibangun.			
3.	Fotokopi PBB tahun terakhir.			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).			
5.	Surat izin lokasi/perizinan dan rekomendasi teknis : a. ..... b.			
6.	Fotocopy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan.			
7.	Foto copy rekomendasi dari Departemen Agama dan Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi bangunan tempat ibadah.			
8.	Permohonan IMB untuk Bangunan Menara Telekomunikasi ditambah : a. asuransi kecelakaan dari segala resiko yang ditimbulkan dengan keberadaan menara. b. kajian dari dampak radiasi.			
9.	Surat pernyataan persetujuan jiran.			
10.	Peta situasi rencana pembangunan.			
11.	Surat pernyataan menanam pohon.			
12.	Persyaratan lainnya : a. ..... b. ..... c.			
13.	Surat perjanjian pemanfaatan tanah.			

No Pendaftaran : .....
Tanggal Pendaftaran : .....

Lampiran C5a

FORMULIR PERMOHONAN RENOVASI DAN REHABILITASI BANGUNAN

..... 20.....

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Renovasi dan Rehabilitasi Bangunan .....*)

Kepada
Yth. Camat .....
di-
.....

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ..... **)
Alamat : Jl. .....RT. ..... RK. .....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS
Pekerjaan : .....
No. Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan renovasi dan rehabilitasi bangunan ..... dengan ukuran panjang : ..... M', lebar : ..... M' (Luas ..... M2) di atas tanah HM/ HGB/ HP ***) No ....., atas nama :

Nama Pemegang IMB Lama : ..... **)
Nomor dan Tanggal IMB Lama : .....
Sifat Bangunan : permanen/semi permanen ***)
Lokasi bangunan yang dimohonkan untuk renovasi dan rehabilitasi terletak di :
Alamat : Jl. .....RT.....RK.....
Kelurahan/Desa.....
Kec. .....Kab. HSS.

Rencana bangunan tersebut di atas berbatasan di :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
- Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
- Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Lurah/Kades | Ketua RT | Pemohon,

..... | ..... | .....

Keterangan :
*) diisi oleh petugas
**) diisi nama pemohon atau nama badan hukum
***) coret yang tidak perlu

HM : Hak Milik
HGB : Hak Guna Bangunan
HP : Hak Pakai

Lampiran C5b

DAFTAR PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

No.	Jenis Lampiran	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan/Formulir dari KPPT.			
2.	Surat Bukti Hak Atas Tanah, dimana bangunan tersebut direncanakan dibangun.			
3.	Fotocopy PBB tahun terakhir.			
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
5.	Foto copy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan.			
6.	Foto copy IMB lama.			
7.	Surat pernyataan tidak ada perubahan bangunan.			
8.	Surat pernyataan persetujuan jiran.			
9.	Peta situasi rencana pembangunan.			
10.	Surat pernyataan menanam pohon.			
11.	Persyaratan lainnya : a. ..... b. ..... c.			
12.	Surat perjanjian pemanfaatan tanah			

Lampiran C6a

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KECAMATAN.....

Jalan .....

KEPUTUSAN CAMAT .....

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR .....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

CAMAT .....,

Menimbang **:** a. ...

c. ...

Mengingat **:** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ..... tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ..... Nomor.....)

Memperhatikan: **1.** Surat Permohonan An. ..... tanggal..... Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

4. Rekomendasi Laporan Hasil Pengukuran Tim Teknis, tanggal.....;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :

Nama :
Alamat :
Untuk Mendirikan Bangunan :
Yang Terletak di :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Bangunan yang diberikan IMB sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berukuran :

Volume Bangunan : 1.
2.
3.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktu KESATU deberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Letak Bangunan maupun batas-batasnya harus sesuai Desain/Gambar situasi sebagaimana terlampir, dengan Garis Sempadan Bangunan ..... M dan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku :

   a. ...
   b. ...
   c. ...

2. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
3. Telah membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar : Rp. ..... (dengan angka)
4. Pelaksanaan pembangunan hanya dilakukan setelah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
5. Mendirikan Bangunan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Tata Ruang Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berlaku.
6. Apabila Pemerintah mengadakan pelebaran jalan atau ada keperluan lainnya yang menyangkut Kepentingan Umum maka bangunan tersebut dibongkar dengan perongkosan / biaya sendiri oleh yang bersangkutan.
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini dapat ditinjau / ditarik, apabila diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan demi kepentingan umum dan pembangunan.

KEEMPAT : Apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, maka pemberian izin akan dicabut kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

CAMAT.....

.....

NIP. .....

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.HSS
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab.HSS
4. Inspektur Kab.HSS
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.HSS
6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
7. Arsip

Lampiran KC1

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing jiran yang langsung berdekatan dengan rencana pembangunan ....., yang terletak di Jl. ..... RT. ....., RK. ..... Kel./Desa ....., Kec. ..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kepunyaan :

1. Nama : .....
2. Tempat/Tgl. Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Alamat : Jl. .....
   RT.....Kel./Desa.....
   Kec....., Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan ini menyatakan, bahwa kami benar-benar tidak keberatan dan setuju atas pembangunan ..... tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan kami tanda tangani bersama-sama di bawah ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang berbatasan langsung dengan rencana bangunan :

No	Nama	Batas di sebelah	Tanda Tangan
1.	.....	Utara	.....
2.	.....	Selatan	.....
3.	.....	Timur	.....
4.	.....	Barat	.....

..... 20.....

Mengetahui :
Lurah/Kades .....

(.....)

Mengetahui :
Ketua Rukun Tetangga.....

(.....)

Lampiran KC2

PETA SITUASI

RENCANA PEMBANGUNAN .....

MILIK : .....
LOKASI BANGUNAN :
Jalan : .....
Kelurahan/Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

Catatan : Terlampir gambar rencana teknis dan perhitungan voume *)

..... 20.....

Mengetahui :
Ketua Rukun Tetangga.....

Pemilik Bangunan

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) : Kalau ada

Lampiran KC3

SURAT PERNYATAAN MENANAM POHON

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Alamat : .....
.....
.....
Pekerjaan : .....

Sehubungan dengan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di : ....., RT ....., RK .....,
Kelurahan/Desa .....,
Kec. ..... Kab. HSS.

Sesuai dengan Program Pemerintah Kab. HSS menciptakan Kandangan yang bersih dan hijau, maka dengan ini saya menyatakan bahwa :

- *Mendukung program tersebut dengan cara menanam pohon di sekitar bangunan yang dibangun atau diperbaiki, direnovasi dan direhabilitasi atau alih fungsi bangunan.*
- *Tanaman tersebut akan terus saya pelihara sampai tumbuh dan berkembang.*

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat serta tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun juga, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, ... 20.....

Mengetahui/Saksi Kades/Lurah	Yang membuat pernyataan, (Pemilik Bangunan)
(.....)	(.....)

Mengetahui/Saksi :
Camat .....,

. (.....)

Lampiran KC4

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMBONGKAR BANGUNAN

Pada hari ini ....., Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat/Tanggal lahir : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : Jl. ....., RT/RW ....., Kel/Desa ....., Kec. ..... Kab.HSS.

sebagai Pemohon, terlebih dahulu menjelaskan :

bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ....., yang luasnya ..... M2, berlokasi di Jl. .... RT/RW ....., Kelurahan/Desa..... Kec. ....., Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang Saya ajukan tidak memenuhi syarat Sempadan Bangunan terhadap As Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Untuk kepentingan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang Saya ajukan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bersedia dan siap membongkar bangunan yang dimohon, apabila Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memerlukan pelebaran jalan atau keperluan lain untuk kepentingan umum dalam Pembangunan Daerah tanpa menuntut ganti rugi.
2. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang melaksanakan pembongkaran bangunan tersebut apabila Saya tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Segala biaya yang berhubungan pembongkaran maupun kerugian yang timbul akibat pelaksanaan ketentuan Pasal 2 menjadi beban dan tanggung jawab Pemohon.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, dengan pikiran yang jernih dan akal pikiran yang sehat tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan serta dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Kandangan, ... 20.....

PEMOHON
Pembuat Pernyataan,

MATERAI
Rp.6.000,-

.....

Mengetahui,
PEMBERI IZIN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

.....
NIP.

Lampiran KC5

SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ……
Umur : ……
Pekerjaan : ……
Alamat : ……

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan tidak keberatan atas dibangunnya ……., dengan ukuran Luas : …… M2, oleh :

N a m a : ……
Umur/Tanggal Lahir : ……
Pekerjaan : ……
Alamat : ……

Di atas tanah saya yang terletak di Jl. …… ……., RT. ……., Kelurahan/Desa……, Kecamatan…… Kab. HSS. (Akte Jual Beli/SPPFBT/Sertifikat Hak Milik Nomor. ……. tanggal …….).

Apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau masalah terhadap tanah saya tersebut akibat dibangunnya ……. oleh : saudara ……., maka akan kami selesaikan sendiri, tanpa melibatkan Dinas/Instansi yang menerbitkan IMB.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa paksaan dari siapapun juga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……. 20……

Yang Membuat Pernyataan ,

Materai
Rp.6.000

Saksi :

Lurah/Kepala Desa ……., ……

…….

Lampiran KC6

KOP KECAMATAN

Kandangan, ... 20....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Kandangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ..... Tahun ..... Tanggal .....Pasal 7 Ayat (1) sebagaimana perihal tersebut di atas, bersama ini terlampir disampaikan permohonan dan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama :

Nama :
Umur/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Lokasi Bangunan :
Jenis Bangunan :
NOP :

Persyaratan Yang Bersangkutan :

No	Persyaratan	Kelengkapan	Keterangan
1.	Permohonan yang bersangkutan		
2.	Surat Keterangan Persetujuan Jiran yang diketahui oleh RT dan Lurah/Kades		
3.	Denah Lokasi bangunan/jarak sempadan		
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
5.	Fotocopy Hak atas tanah/Sertipikat Tanah		
6.	Fotocopy PBB tahun terakhir		
7.	Izin Lingkungan		
8.	Izin Lokasi		
9.	Persyaratan lainnya : a. ..... b. ..... c.		
10.	Surat perjanjian pemanfaatan tanah.		

Demikian permohonan ini disampaikan untuk bahan proses dan keputusan selanjutnya.

CAMAT .....

.....

Tembusan : (tanpa Lampiran)
1. Kelurahan .....

TATA CARA PENGUKURAN

1. Pasal 19 : Sempadan bangunan terhadap muka jalan

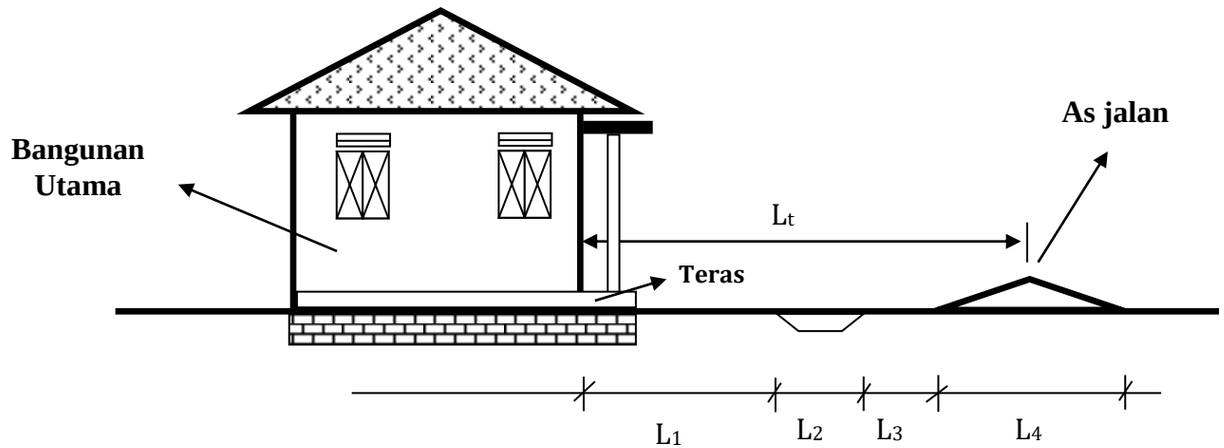

$L_t = L_1+L_2+L_3+1/2L_4$

Keterangan :

L_t	:	**Jarak bangunan utama dari as jalan**
L_1	:	**Jarak bangunan utama dari saluran**
L_2	:	**Lebar saluran**
L_3	:	**Lebar bahu jalan**
L_4	:	**Lebar jalan**

No	Kategori	Panjang L_1	Keterangan
1.	Pada jalan nasional	25 m	Dari As jalan
2.	Pada jalan provinsi	20 m	
3.	Pada jalan kabupaten	15 m	
4.	Pada jalan kabupaten di dalam kecamatan	10 m	
5.	Pada jalan desa di dalam kecamatan	8 m	
6.	Pada jalan setapak	5 m	
7.	Pada jalan di dalam komplek perumahan dan sejenisnya	3 m	
8.	Pada jalan di dalam gang	2 m	

2. **Pasal 20 ayat (1) Untuk mendirikan komplek perumahan/real estate dan sejenisnya, lebar jalan ditentukan sebagai berikut:**
   a. **Pintu masuk utama minimum lebar jalan 8 meter sudah termasuk drainase;**

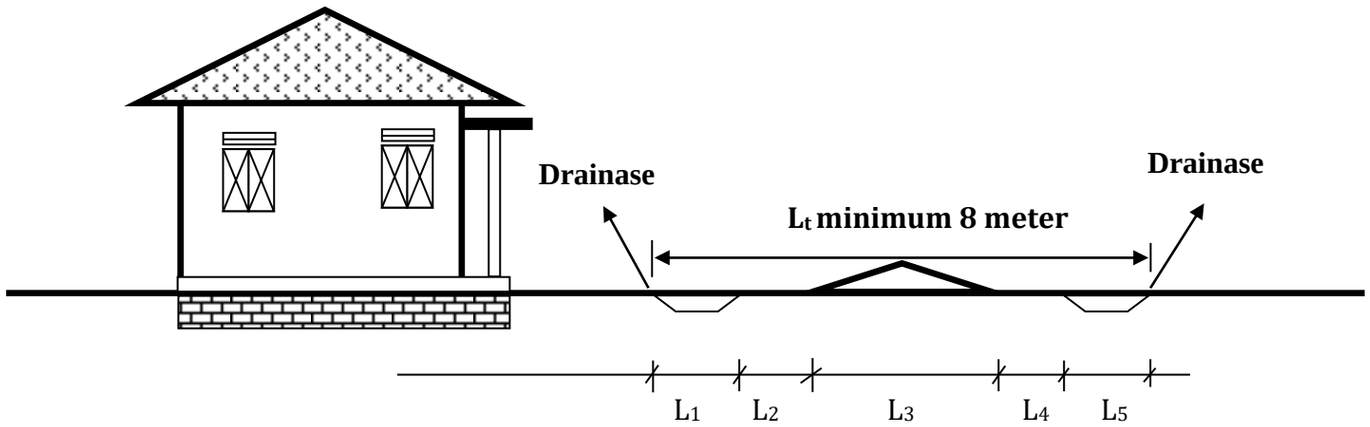

$$L_t = L_1+L_2+L_3+L_4+L_5$$

Keterangan :
L_t : Lebar jalan pintu masuk utama sudah termasuk drainase minimum 8 meter
L_1 : Lebar drainase
L_2 : Lebar bahu jalan
L_3 : Lebar jalan
L_4 : Lebar bahu jalan
L_5 : Lebar drainase

b. Lebar jalan di dalam komplek perumahan minimum sebesar 6 meter sudah termasuk drainase;

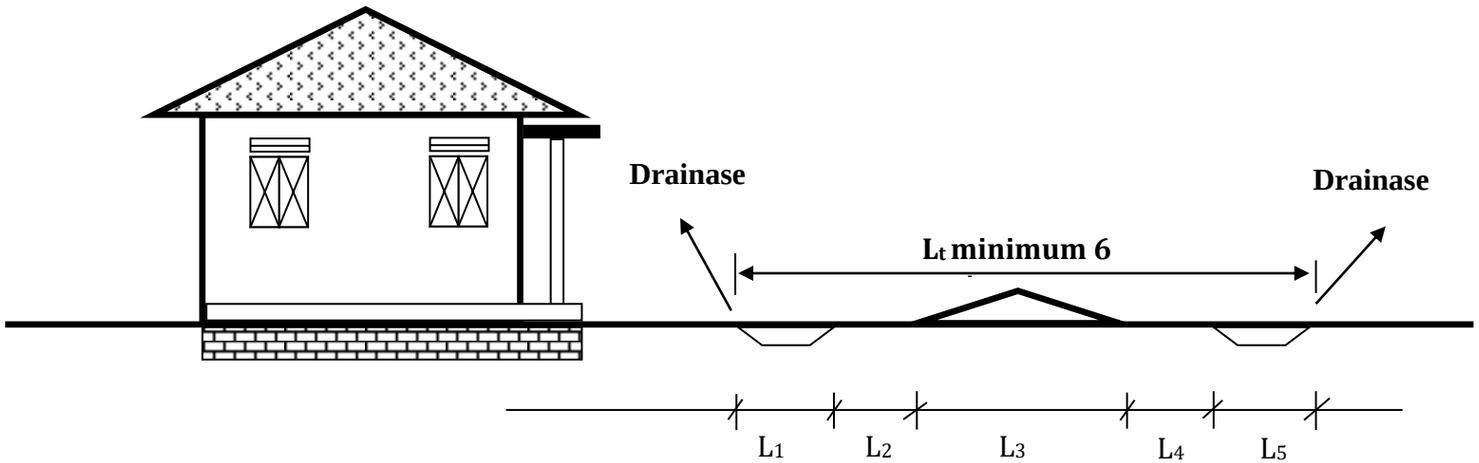

$$L_t = L_1+L_2+L_3+L_4+L_5$$

Keterangan :
L_t : Lebar jalan di dalam komplek perumahan sudah termasuk drainase minimum 6 meter
L_1 : Lebar drainase
L_2 : Lebar bahu jalan
L_3 : Lebar jalan
L_4 : Lebar bahu jalan
L_5 : Lebar drainase

3. **Pasal 21 Ayat (2) poin a : Untuk pembangunan kios, toko di lingkungan pasar dan sekitarnya bangunan sisi luar minimum 3 (tiga) meter dari tepi perkerasan jalan raya**

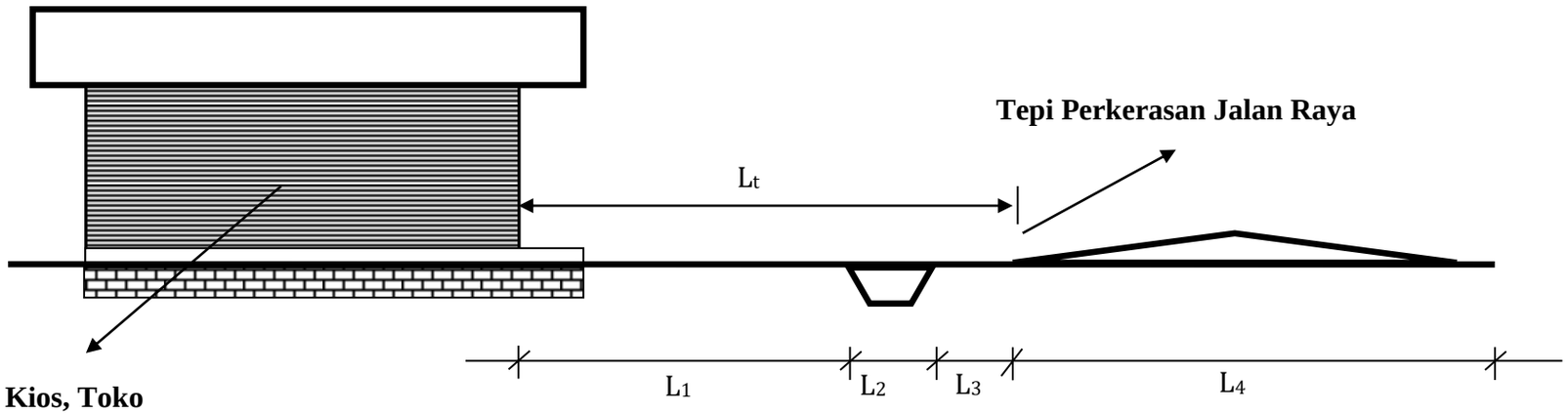

$L_t = L_1 + L_2 + L_3$

Keterangan :

L_t : Jarak bangunan utama dari tepi perkerasan jalan raya
L_1 : Jarak bangunan utama dari saluran
L_2 : Lebar saluran
L_3 : Lebar bahu jalan
L_4 : Lebar jalan

4. Pasal 21 Ayat (3) poin a : Untuk pembangunan kios di luar lingkungan pasar, jarak minimal 3 (tiga) meter dari tepi bahu jalan

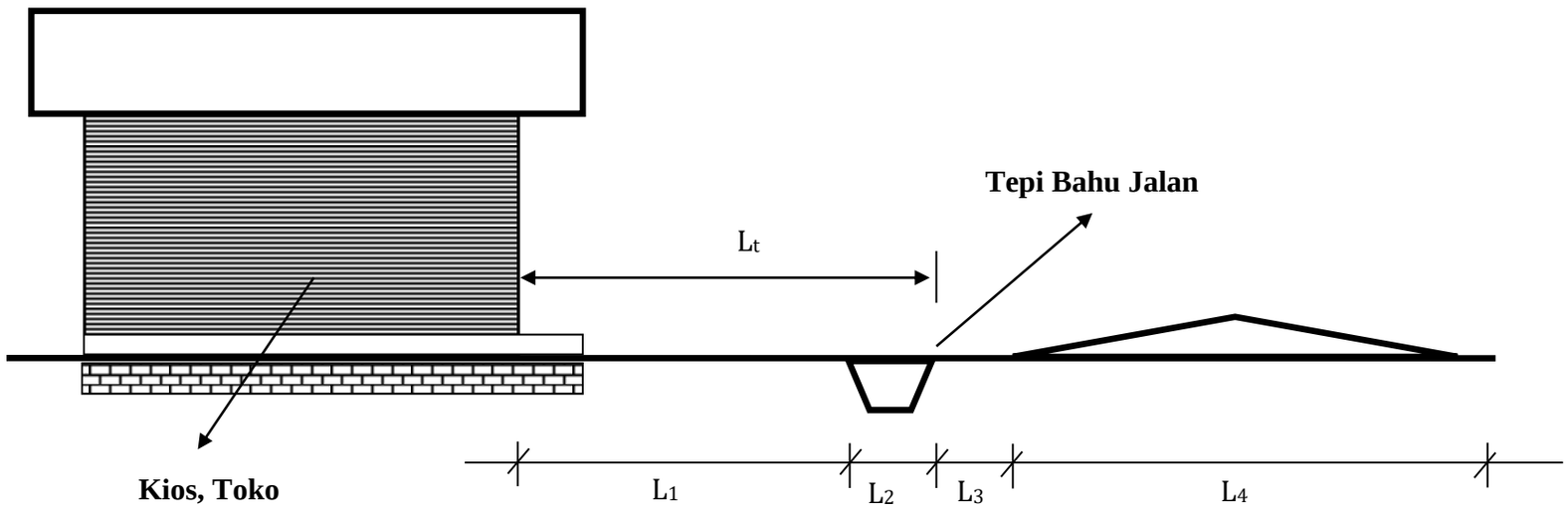

$$L_t = L_1 + L_2$$

Keterangan :

L_1 : Jarak bangunan utama dari tepi bahu jalan
L_2 : Jarak bangunan utama dari saluran
L_3 : Lebar saluran
L_4 : Lebar bahu jalan
L_5 : Lebar jalan

5. **Pasal 21 Ayat (4) poin a : Untuk pembangunan toko atau tempat usaha di luar lingkungan pasar, jarak bangunan minimum 5 (lima) meter dari bahu jalan**

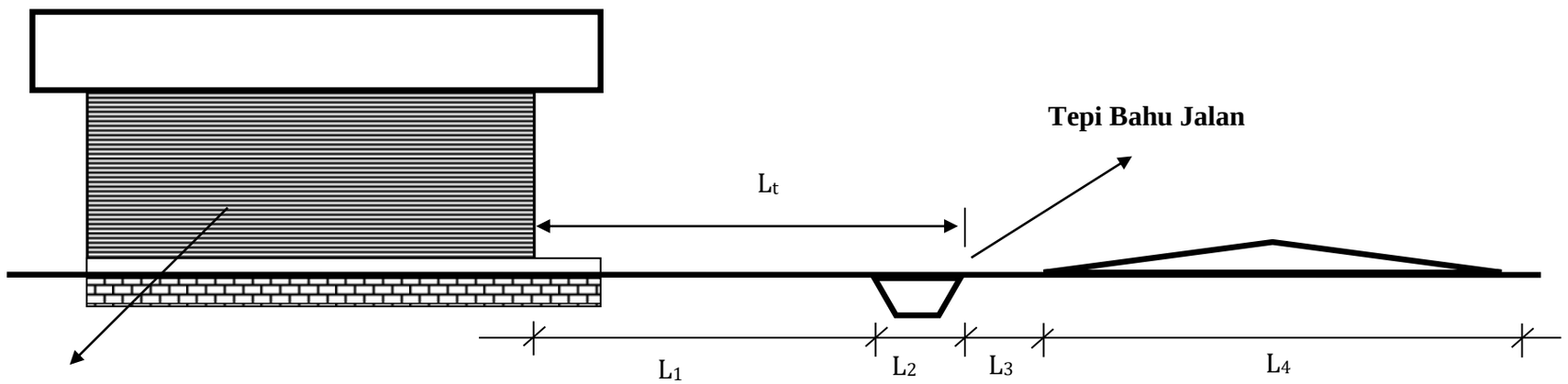

$L_t = L_1 + L_2$

Keterangan :

L_t : Jarak bangunan utama dari tepi bahu jalan
L_1 : Jarak bangunan utama dari saluran
L_2 : Lebar saluran
L_3 : Lebar bahu jalan
L_4 : Lebar jalan

6. **Pasal 21 Ayat (4) poin d : Untuk pembangunan toko atau tempat usaha di luar lingkungan pasar, pagar bagian depan atau sejajar jalan dibuat mundur ke arah bangunan sejauh 1(satu) meter dari sisi luar riol**

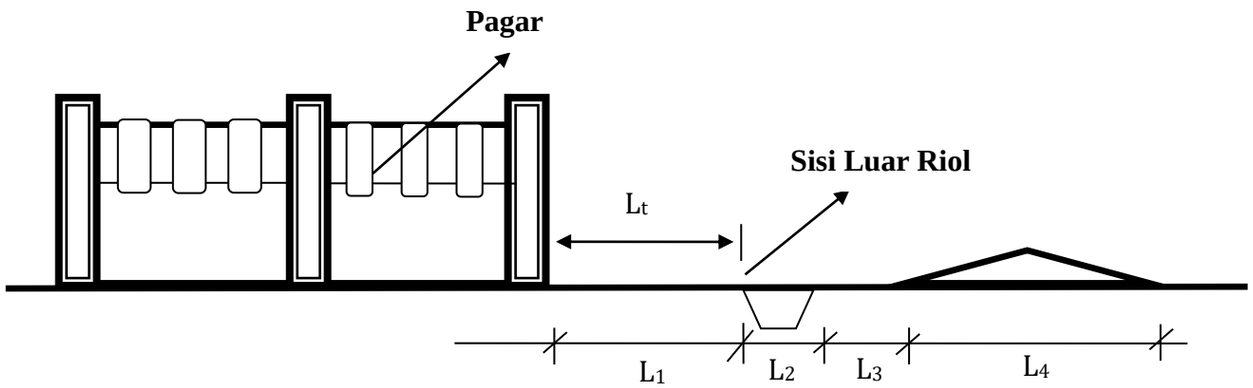

$L_t = L_1$

Keterangan :

L_t : Jarak bangunan (pagar) dari sisi luar riol
L_1 : Jarak bangunan (pagar) dari sisi luar riol
L_2 : Lebar saluran
L_3 : Lebar bahu jalan
L_4 : Lebar jalan

7. **Pasal 21 Ayat (5) : Untuk pembangunan ruko, mini market, hotel, mall dan sejenisnya diharuskan memiliki halaman parkir. Jarak bangunan ruko, mini market, hotel, mall, dan lain-lain dari bahu jalan ditentukan :**

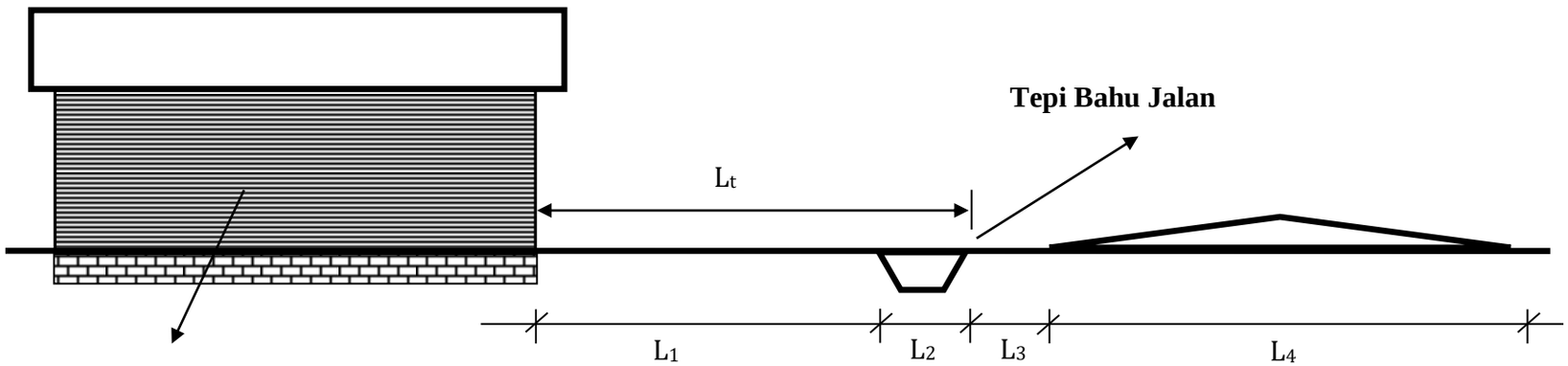

$$L_t = L_1 + L_2$$

Keterangan :
L_t : Jarak bangunan dari tepi bahu jalan
L_1 : Jarak bangunan dari saluran
L_2 : Lebar saluran
L_3 : Lebar bahu jalan
L_4 : Lebar jalan

No	Kategori	Panjang L_1	Keterangan
1.	Pada jalan nasional	20 m	Dari tepi bahu jalan
2.	Pada jalan provinsi	15 m	
3.	Pada jalan kabupaten	10 m	

8. Pasal 22 Ayat (1) : Jarak ujung bangunan pelengkap

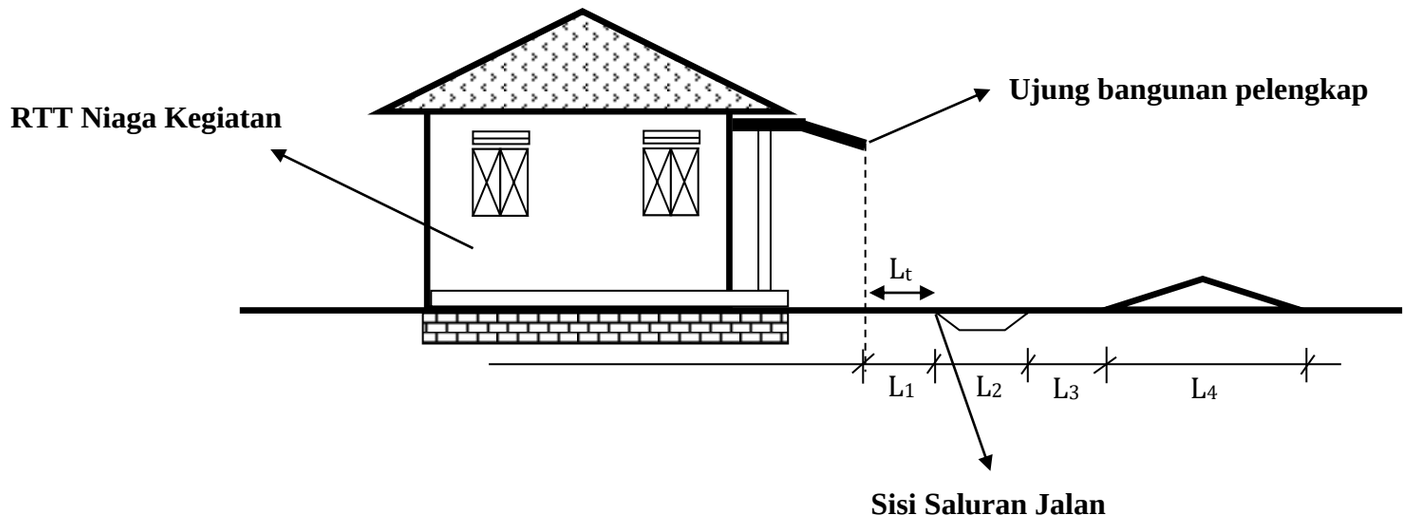

$L_t = L_1$

Keterangan :
L_t : Jarak ujung bangunan pelengkap dari sisi saluran jalan
L_1 : Jarak ujung bangunan pelengkap dari sisi saluran jalan
L_2 : Lebar saluran
L_3 : Lebar bahu jalan
L_4 : Lebar jalan

No	Kategori	Panjang L_1	Keterangan
1.	Pada jalan nasional dan provinsi	Min. 2 m	Dari sisi saluran jalan
2.	Pada jalan kabupaten atau jalan desa	Min. 1 m	
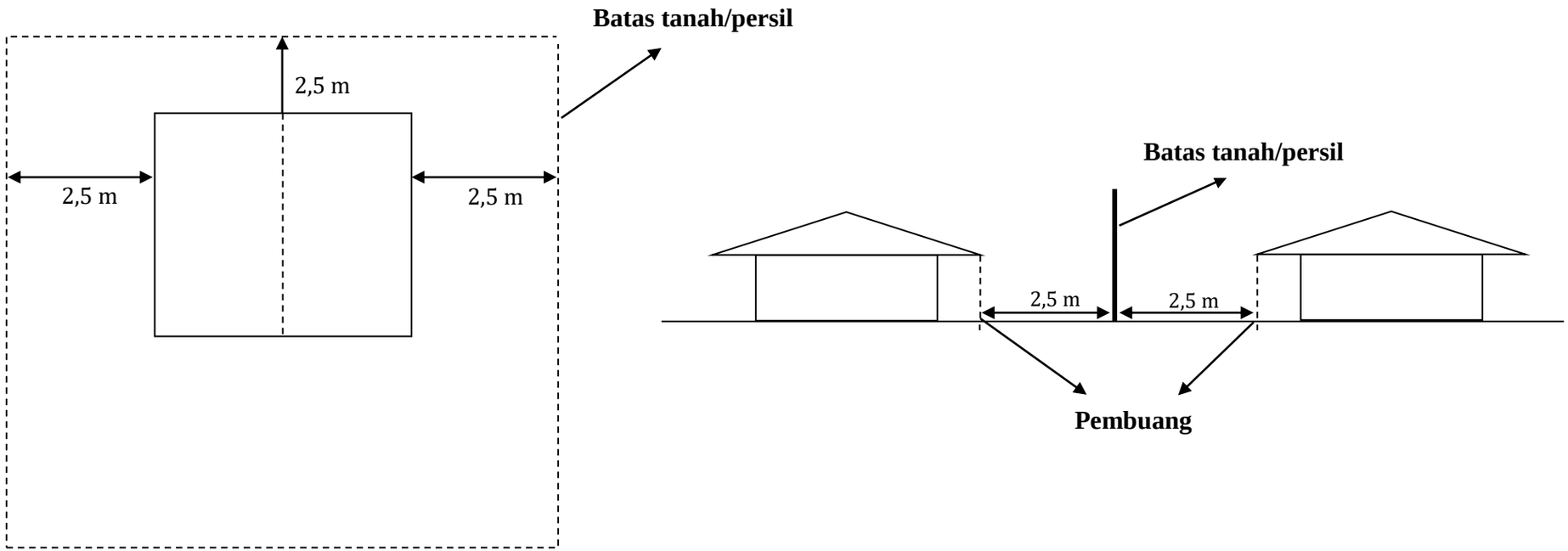
9. Pasal 22 Ayat (2) : Jarak pembuang ditetapkan sebagai berikut : a. Batas kiri dan kanan masing-masing bangunan minimal 2,5 meter dari batas tanah/persil; b. Batas belakang bangunan minimal 2,5 meter dari batas tanah/persil;